

Tindak Lanjut Penerapan Pengelolaan Keuangan UMKM dan *Entrepreneur Bluepreneur Tourism* dalam Pencapaian *Sustainable Tourism*

Ruswan Nurmadi^{1*}, Liza Novietta¹, Yani Suryani¹, Desi Ika¹, Rizki Fillhayati Rambe¹

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia
Email : ¹rnurmadi@gmail.com ²lizanovietta@gmail.com, ³syani91@yahoo.co.id, ⁴desiika082@gmail.com,
⁵rb.fillhayati@gmail.com
(*: coressponded author)

Abstrak—Pada masa sekarang ini, pengusaha Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), termasuk entrepreneur yang nilai usahanya termasuk kategori UMKM, seharusnya tidak boleh hanya puas apabila usahanya dapat bertahan, yang biasanya masih dalam kategori mikro, tetapi seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana agar usahanya bisa “naik kelas” ke tingkatan berikut, yaitu kategori kecil dan kategori menengah. Hal ini sesuai dengan data UMKM di Indonesia saat ini di mana 99% jenis usaha yang termasuk UMKM di Indonesia masih dalam kategori mikro. Sebagai salah satu syarat memperoleh pinjaman pendanaan dari pemerintah atau lembaga keuangan atau perbankan yang resmi, pelaku UMKM harus memiliki laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia yang cukup banyak dapat diserap pelaku UMKM untuk pengembangan UMKM tersebut. Bluepreneur Tourism untuk Pencapaian Sustainable Tourism merupakan salah satu program Pemerintah yang memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan kemungkinan pulihnya kembali potensi pariwisata Indonesia setelah berakhirnya pandemi Covid-19, yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian, termasuk sektor perdagangan di tingkat UMKM. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, UMKM, Pengelolaan Keuangan, Bluepreneur Tourism, Sustainable Tourism

Abstract— Nowadays, Medium, Small and Micro Business (MSME) entrepreneurs, including entrepreneurs whose business value is included in the MSME category, should not only be satisfied if their business can survive, which is usually still in the micro category, but should have started thinking about how to make their business can "move up" to the following levels, namely the small category and the medium category. This is in accordance with current data on MSMEs in Indonesia where 99% of the types of businesses included in MSMEs in Indonesia are still in the micro category. As one of the conditions for obtaining funding loans from the government or official financial or banking institutions, MSME players must have financial reports in accordance with applicable regulations. In this way, quite a lot of assistance from the Government of the Republic of Indonesia can be absorbed by MSME actors for the development of these MSMEs. Bluepreneur Tourism for the Achievement of Sustainable Tourism is one of the Government's programs that takes advantage of Indonesia's position as an archipelagic country and the possibility of Indonesia's tourism potential recovering after the end of the covid-19 pandemic, which is expected to boost the economy, including the trade sector at the MSME level. This community service was carried out in the Baru Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District.

Keywords: Community Service, MSMEs, Financial Management, Bluepreneur Tourism, Sustainable Tourism

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, di tengah era digitalisasi, bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) tetap menjadi prioritas Pemerintah sebagai salah satu faktor pendukung perekonomian negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta seluruh unit di Kementerian Keuangan memperbaiki pengelolaan dana untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kemenkeu harus mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan agar berdampak luas bagi UMKM, ungkapnya saat membuka *Focus Group Discussion* (FGD) “Sinergi Pemberdayaan UMKM”, Senin, 31 Januari 2022 (www.djpb.kemenkeu.go.id, 2022). Menurut (Tambunan, 2021) dalam bukunya *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, menyebutkan pada 1997/1998 saat terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi berlebihan, sektor UMKM masih mampu bertahan. Oleh karenanya, dalam menghadapi krisis dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah mendorong pengembangan dan penguatan sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara-negara lain yang masuk ke dalam negara

berkembang, yang juga menitikberatkan kepada perkembangan UMKM, terutama pasca pandemi covid-19, sebagai sektor pendukung perekonomian negara (Tambunan & Dasaraju, 2022).

Salah satu sasaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah penguatan UMKM. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif bagi pelaku UMKM antara lain melalui kebijakan subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kebijakan KUR terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM, yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30 persen. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM. Untuk meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM sampai Rp10 miliar melalui PT Jamkrindo dan Askkrindo (Persero) pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi beban karyawan UMKM dengan insentif Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku UMKM, diberikan insentif PPH Final 0,5 persen Ditanggung Pemerintah. Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak atas usahanya sampai dengan batas tertentu, dan tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. UMKM juga diberi insentif PPH Pasal 22 Impor (www.djpb.kemenkeu.go.id, 2022).

Sasaran pengguna produk UMKM sangat beragam, tergantung dari produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sendiri. Ada pelaku UMKM yang hanya menargetkan konsumen lokal atau regional, ada pelaku UMKM yang menargetkan konsumen nasional dan ada pula pelaku UMKM yang menargetkan konsumen manca negara. Khusus untuk pelaku UMKM yang menargetkan konsumen manca negara, tentu saja hal ini berkaitan dengan pariwisata. Pemerintah, sejak tahun 2019, sudah menyinergikan antara pariwisata dengan UMKM, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat di lokasi-lokasi pariwisata. Menurut Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 lalu, total kebutuhan dan pembiayaan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp 500 triliun hingga tahun 2024. Sekitar Rp 300 triliun atau 60% nya khusus ditujukan untuk pengembangan 10 Bali Baru; sedangkan sisanya untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Setidaknya tercatat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dapat dibiayai dalam program KUR, diantaranya usaha daya tarik pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, penyediaan akomodasi, kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan dan pusat oleh-oleh. Hal ini seharusnya bisa dan sebaiknya dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM pariwisata (www.ekon.go.id, 2019).

Lebih lanjut, agar sasaran pelaku UMKM terhadap konsumen mancanegara dapat berkesinambungan, maka Pemerintah menginginkan sektor turisme yang berkesinambungan pula atau *sustainable tourism*. *The World Tourism Organization*/Organisasi Pariwisata Dunia mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai “pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat tuan rumah” (www.sdgs.un.org, 2024). Tiga pilar pariwisata berkelanjutan adalah kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (terkadang disebut sebagai planet, manusia, dan keuntungan). Jelas terlihat kaitannya dengan perekonomian, di mana pelaku UMKM termasuk di dalamnya.

Pariwisata adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan sumber devisa dan lapangan kerja yang penting, dan juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Pariwisata yang berhubungan dengan kelautan, serta pariwisata pesisir, misalnya, merupakan sektor penting perekonomian di negara-negara berkembang kepulauan kecil/*small island developing states* (SIDS) dan negara-negara pesisir kurang berkembang/*coastal least developed countries* (LDCs), termasuk potensi Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Untuk Indonesia sendiri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menggelar *ASEAN Blue Economy Forum 2023* pada 2-4 Juli 2023 di Belitung yang membahas pentingnya ekonomi biru sebagai salah satu prioritas kerja sama ASEAN. Ekonomi biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan sehingga turut mendukung pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya. Ekonomi biru juga sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (www.tribunnews.com¹, 2023). Juga telah terlaksana kegiatan *Archipelagic and Island States (AIS) Forum* yang menggelar acara *Matchmaking Sustainable Solutions: Bringing Investors and Bluepreneurs Together* di Jakarta (30/6/2023). Acara ini merupakan bagian dari program *AIS Blue Innovative Solution* untuk mendorong pertumbuhan wirausahawan dan peluang bagi inovator di bidang ekonomi biru. Disebutkan bahwa sektor ekonomi biru dinilai sangat potensial lantaran Indonesia merupakan negara

kepulauan terbesar di dunia. Sisi potensial tersebut terkait perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah hingga mitigasi perubahan iklim (www.tribunnews.com², 2023).

Universitas Harapan (UnHar) Medan secara aktif dan berkala selalu melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan salah satu unsur Tri Darma Perguruan Tinggi selain Pendidikan/Pengajaran dan Penelitian. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bisa dilakukan individual oleh Dosen maupun Kelompok Dosen, dengan melibatkan mahasiswa, di mana kegiatan diawasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UnHar Medan. Untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kali ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Tim Pengabdian kepada Masyarakat UnHar Medan yang tergabung dalam Tim *International Community Service Responsibility* yang diadakan oleh Forum Kerjasama Perguruan Tinggi (FKPT), melakukan tindak lanjut atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya tentang *Sustainable Bluepreneur Tourism* UMKM.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan *Entrepreneur*



Gambar 1. Gambaran UMKM di Indonesia (Sumber : www.kemenkopukm.go.id, 2024)

Dapat dilihat pada gambar 1 di atas, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), gambaran UMKM di Indonesia, termasuk total lapangan kerja (99,9%), total tenaga kerja (96,9%), kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional 60,5% dan hal penting lainnya. Juga terlihat, dari keseluruhan UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (KemenkopUKM), usaha mikro memiliki persentase terbesar yaitu 99,62% (www.kemenkopukm.go.id, 2024). Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus Pemerintah, karena besarnya omset per tahun dan modal usaha pelaku UMKM yang belum dapat menembus bidang Usaha Kecil maupun bidang Usaha Menengah. Banyak hal telah dilakukan Pemerintah agar UMKM dapat "Naik Kelas", diantaranya dengan mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM, Program Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Produk Usaha Mikro, hibah bantuan modal, dan lain-lain.

Entrepreneur merupakan bagian dari pelaku UMKM bila usaha yang dilakukannya termasuk ke dalam kriteria UMKM. (Fountain & Zimmerer, 2020) menyatakan bahwa seorang *entrepreneur* adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis, dengan menghadapi risiko dan ketidakpastian dan bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya.

2.2 *Bluepreneur*, *Bluepreneur Tourism* dan *Sustainable Tourism*

Bluepreneur merupakan istilah untuk *entrepreneur* dari negara yang mendukung program *Blue Economy* (ekonomi biru) yang merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. *Blue Economy* dapat diterapkan penduduk Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian termasuk wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan, atau yang berada di sekitar wisata perikanan dan kelautan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, turut mendukung program ini dengan bergabung dalam *Archipelagic and Island States (AIS) Forum* (www.aisforum.org, 2024). Pemerintah

mendukung perkembangan *bluepreneur* di Indonesia. Sebagai contoh, belum lama berselang, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkomarves) bekerjasama dengan Sekretariat AIS Forum, AIDAN Limited, dan the National Capital District Commission (NCDC) Papua Nugini, serta didukung oleh PT Pertamina Hulu Energi mengadakan pelatihan bertajuk “*Bluepreneur: Coastal Communities Training*” di Port Moresby, Papua Nugini. Program pelatihan ini merupakan langkah awal dari upaya AIS Forum dalam menjalin kerjasama untuk peningkatan kapabilitas masyarakat di Papua Nugini melalui berbagai kegiatan dan pemberdayaan. Digelar di Stanley Hotel, Port Moresby, pada 4-6 Desember 2023, pelatihan ini ditujukan untuk memberikan berbagai macam wawasan dan keterampilan kepada para *bluepreneurs* agar dapat berinovasi dalam pengembangan usahanya. Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan *Women’s Bluepreneur Training* yang dilakukan di Jakarta pada 23-24 Oktober silam (www.suara.com, 2023)

Bluepreneur Tourism merupakan bagian dari *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan. *Sustainable tourism* menurut (Arida & Sunarta, 2017) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. *Bluepreneur tourism* merupakan bagian dari *sustainable tourism* yang ditekankan untuk daerah yang memiliki wisata perikanan atau kelautan.

2.3 Pengelolaan Keuangan untuk UMKM dan *Entrepreneur*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa keseluruhan UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (KemkopUKM), usaha mikro memiliki persentase terbesar yaitu 99,62%. Hal ini menunjukkan, di tengah usaha Pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM, pelaku UMKM dan *entrepreneur* belum dapat memaksimalkan peluang-peluang pengembangan usaha yang diberikan Pemerintah atau lembaga keuangan dan perbankan, agar usahanya tersebut dapat “Naik Kelas” dari usaha mikro ke dalam lingkup usaha kecil dan usaha menengah. Salah satu penyebab utamanya adalah kebanyakan pelaku UMKM dan *entrepreneur* yang belum melakukan pengelolaan keuangan yang baik, seperti yang diungkapkan oleh (Minan et al., 2022) dan (Novietta & Nurmadi, 2020).

Hanya dengan memiliki pengelolaan keuangan yang baik, maka pelaku UMKM dan *Entrepreneur* dapat memperoleh kredit usaha dari pemerintah atau pinjaman modal dari lembaga keuangan resmi, sehingga dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usaha, bukan lagi hanya untuk mempertahankan usaha.

Di Indonesia, melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pelaporan keuangan UMKM dan *entrepreneur* pada saat ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang (www.iaiglobal.or.id).

2.2. Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir (Sumber : Penulis, 2024)

Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada kerangka berpikir. Pada tahap pertama, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan melakukan pengamatan lanjutan terhadap pengelolaan keuangan yang sebelumnya juga telah dilakukan pada kegiatan awal (Nurmadi et al., 2023). Pengamatan lanjutan diperlukan untuk melihat apakah setelah pelaku usaha melakukan pengelolaan keuangan, sebesar apa peluang pelaku usaha untuk memperoleh modal tambahan agar dapat "naik kelas", untuk pencapaian *Sustainable Tourism* melalui Program *Bluepreneur Tourism*. Kegiatan dilakukan di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan juga menganalisis potensi UMKM/*entrepreneur* di lokasi pengamatan.

3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan *action research*, yaitu kegiatan yang terdiri dari perbaikan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dikerjakan secara tersusun untuk mencapai tingkatan riset yang diikuti oleh penjelasan (Newhart & Patten, 2023).

3.1 Pengelolaan Keuangan

Sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sebagai penyerap tenaga kerja, memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Idealnya, Pemerintah menginginkan, pelaku usaha dalam kategori mikro segera naik kelas ke kategori kecil dan kategori menengah. Akan tetapi, kendala yang dimiliki adalah kurangnya dana, sedangkan untuk memperoleh dana tambahan atau pinjaman dari pemerintah maupun lembaga keuangan dan perbankan resmi, salah satu syaratnya adalah pelaku UMKM dan *entrepreneur* harus memiliki pengelolaan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang telah dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

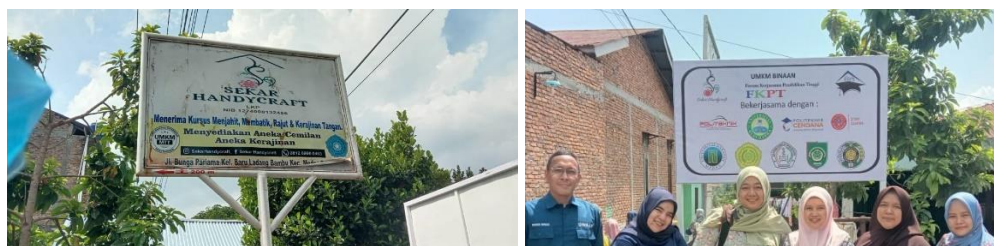
Melalui riset terdahulu yang relevan, banyak pelaku UMKM dan *entrepreneur* di Indonesia yang belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik, seperti yang dinyatakan oleh (Suryanto, 2023), (Fryadi & Frenedes, 2023) dan (Indriasih et al., 2023). Rata-rata penyebab belum dilakukannya pengelolaan keuangan yang baik termasuk membuat laporan keuangan sesuai standar adalah ketidaktahuan pelaku UMKM dan *entrepreneur* dalam hal tersebut dan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Akademik.

3.2. *Bluepreneur Tourism* dan *Sustainable Tourism*

Blue Economic/Ekonomi Biru, yang program pertumbuhan ekonomi negara-negara kepulauan yang memiliki sektor industri dan pariwisata yang berdekatan dengan laut, di mana salah satu programnya adalah *Bluepreneur Tourism*. Di mana pelaku usaha dapat memanfaatkan sektor pariwisata untuk memasarkan hasil usahanya di sekitar lokasi pariwisata tersebut. *Sustainable Tourism* tersendiri merupakan program Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan agar sektor pariwisata dapat berkelanjutan dengan pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, termasuk serta ekonomi, untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

4. HASIL

Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada kerangka berpikir. Pada tahap pertama, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan melakukan pengamatan lanjutan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan UMKM/*entrepreneur* di lokasi kegiatan, dalam hal ini dilakukan di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, sebagai tindak lanjut pengamatan awal yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan menganalisis peluang UMKM/*entrepreneur* di lokasi pengamatan, apakah usaha yang dilakukan dapat "naik kelas" sehingga nantinya dapat mencapai *Sustainable Tourism* melalui Program *Bluepreneur Tourism*.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan

Sekar *Handycraft* dipilih sebagai lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jenis produk berupa souvenir pernikahan, tas, dompet, kerajinan ulos dan lain-lain. Dari hasil pengamatan awal, telah diperoleh data bahwa walaupun mampu bertahan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan UMKM Sekar *Handycraft* mengalami penurunan penjualan produk dan sempat mengalami kerugian. Juga diperoleh data bahwa pengelolaan keuangan walaupun telah dilakukan tidak lagi secara manual, tetapi belum sepenuhnya mempergunakan aplikasi penunjang pencatatan keuangan digital, sehingga belum sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang banyak ditemukan pada pelaku UMKM di Indonesia, seperti yang juga disebutkan dalam penelitian (Yanuardi et al., 2023), (Asyik et al., 2022) dan (Novietta & Nurmadi, 2020).

Dalam pengamatan lanjutan, pelaku UMKM Sekar *Handycraft* memberikan penjelasan kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan, bahwa pengelolaan keuangan telah mulai disesuaikan dengan saran yang diperoleh dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan tentang pentingnya memakai salah satu aplikasi pencatatan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga perhitungan keuangan usaha akan semakin jelas, baik berupa pengeluaran, pemasukan ataupun utang dan piutang antara pelaku usaha dengan pembeli. Akan tetapi, pelaku UMKM Sekar *Handycraft* mengakui bahwa mereka tetap merasa kesulitan dalam memasukkan data keuangan, karena pengetahuan sumber daya manusia yang bertugas untuk memasukkan data keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan yang cukup. Hal ini membuat pelaku UMKM Sekar *Handycraft* merasa khawatir kesalahan dalam memasukkan data akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan kemudian menjelaskan bahwa apabila menggunakan aplikasi pencatatan laporan keuangan yang sederhana, maka yang diperlukan adalah pengetahuan dasar tentang unsur-unsur dalam laporan keuangan, sehingga dapat memasukkan data keuangan dengan tepat.

Dalam diskusi lebih lanjut, pelaku UMKM Sekar *Handycraft* sudah memahami pentingnya membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pendanaan dari Pemerintah atau lembaga keuangan dan Perbankan resmi, juga agar pelaku UMKM Sekar *Handycraft* mengetahui secara detail tentang beban usaha dan pendapatan, sehingga laba bersih setiap periode yang diinginkan dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, pelaku UMKM Sekar *Handycraft* menginginkan adanya pendampingan langsung dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pemakaian aplikasi pencatatan laporan keuangan.

Pelaku UMKM Sekar *Handycraft* juga sudah mulai memahami istilah *Bluepreneur* dan *Sustainable Tourism*. Pelaku UMKM Sekar *Handycraft* siap mendukung program tersebut dengan menyesuaikan produksi beberapa jenis produk yang dikhususkan yang berkaitan dengan posisi Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dalam hal ini, agar pemasaran tepat sasaran, kembali pelaku UMKM Sekar *Handycraft* meminta pendampingan langsung dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal pengemasan produk dan pemasaran produk yang termasuk *Bluepreneur*, dan hal-hal yang dapat membantu promosi produk agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung langsung ke UMKM Sekar *Handycraft* sehingga dapat melihat proses produksi dan pembelian langsung produk oleh wisatawan, selain penjualan produk melalui pemasaran *online* atau

online market place. Kunjungan langsung wisatawan ke tempat UMKM Sekar Handycraft diharapkan dapat mendukung program *Sustainable Tourism* yang dimaksud.

Pada akhir diskusi, dijelaskan peluang dari pelaku UMKM Sekar Handycraft yang saat ini usahanya masih dalam kategori Mikro, untuk ke depannya dapat berkembang dan "Naik Kelas" ke kategori Kecil dan kategori Menengah. Pengembangan usaha tentunya hanya dapat dipenuhi apabila target usaha sekarang sudah dicapai dan syarat-syarat pengembangan usaha juga telah dilakukan, salah satunya memiliki laporan keuangan yang sudah sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menjadwalkan akan kembali lagi mengunjungi UMKM Sekar *Handycraft* sebagai tindak lanjut pendampingan, baik dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi sederhana maupun pendampingan pengemasan dan pemasaran produk agar tepat sasaran, terutama dalam kesesuaian dengan pencapaian ujuan utama, yaitu pengelolaan keuangan UMKM dan *entrepreneur* sebagai pendukung *bluepreneur tourism* untuk pencapaian *sustainable tourism*.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaku UMKM telah melakukan penyesuaian awal dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi sederhana agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan langsung dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pemakaian aplikasi pencatatan laporan keuangan
3. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan langsung dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal pengemasan produk dan pemasaran produk
4. Pelaku UMKM juga sangat antusias dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu *bluepreneur tourism* untuk pencapaian *sustainable tourism*.

5. 2 Saran

Agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, maka yang seharusnya dilakukan :

1. Pelaku UMKM, seperti Sekar *Handycraft*, harus melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun meminta bantuan kepada pihak Pemerintahan Daerah setempat agar memperoleh sosialisasi dan pendampingan mengenai pengembangan UMKM.
2. Diadakannya pelatihan berkala tentang pengembangan UMKM untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
3. Adanya pendampingan langsung dari pihak terkait, misalnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas Pariwisata, Lembaga Perbankan maupun Perguruan Tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. N. S., & Sunarta, I. N. (2017). *Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan)*. In *Pariwisata Berkelanjutan*.
- Asyik, N. F., Patuh, M., Triyonowati, T., Respatia, W., & Nur Laily, N. L. (2022). APLIKASI DIGITAL PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM MAKANAN MINUMAN DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 2(3). <https://doi.org/10.24034/kreanova.v2i3.5265>
- Fountain, M. W., & Zimmerer, T. W. (2020). *Launching Successful Ventures*. In *Launching Successful Ventures*. <https://doi.org/10.4135/9781506358956>
- Fryadi, A., & Frenes, F. M. (2023). EDUKASI PROMOSI PENJUALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA MASYARAKAT. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(1). <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i1.7>
- Indriasih, D., Rahmatika, D. N., Subroto, S., Fajri, A., & Waskito, J. (2023). Assistance for the Preparation of Financial Statements and Taxes for MSMEs in Tegal City. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang1349>
- Minan, K., Novietta, L., & Nurmadi, R. (2022). Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Digital Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital*, 1(1).
- Newhart, M., & Patten, M. L. (2023). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials: Eleventh Edition*. In *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials: Eleventh Edition*.

- <https://doi.org/10.4324/9781003092049>
- Novietta, L., & Nurmadi, R. (2020). Identifikasi Tingkat Pengetahuan Pengusaha Kecil Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Di Lingkungan Kecamatan Medan Labuhan. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2). <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.47>
- Nurmadi, R., Novietta, L., Suryani, Y., & ... (2023). Pengamatan Pengelolaan Keuangan UMKM dan Entrepreneur sebagai Pendukung Bluepreneur Tourism untuk Pencapaian Sustainable Tourism. *Jurnal Pengabdian ...*, 2, 9–16.
<https://ejournal.insightpower.org/index.php/JUPED/article/view/252%0Ahttps://ejournal.insightpower.org/index.php/JUPED/article/download/252/197>
- Puspitasari D, N. L. (2019). Pengembangan Usaha Melalui Penerapan Blue Ocean Strategy (Bos) Pada Ukm Batik Zie Semarang. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, 10(3).
- Suryanto, S. (2023). SOSIALISASI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2).
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.43798>
- Tambunan, T. T. H. (2021). UMKM DI INDONESIA Perkembangan, Kendala, dan Tantangan. In *PRENADA: Vol. 15 X 23 cm*.
- Tambunan, T. T. H., & Dasaraju, H. (2022). COVID-19 and its Reflection on SMEs in Developing Countries. In *COVID-19 and its Reflection on SMEs in Developing Countries*. <https://doi.org/10.52305/JCJI5976>
- Yanuardi, Y., Kristiyanto, D. Y., & Nugroho, N. E. W. (2023). Pencatatan Transaksi Keuangan Ukm Berbasis Website Menggunakan Metode Agile Development. *Academic Journal of Computer Science Research*, 5(2). <https://doi.org/10.38101/ajcsr.v5i2.7346>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
www.iaiglobal.or.id. (2018). <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20EMKM#gsc.tab=0>, diakses tanggal 5 Januari 2024
- www.ekon.go.id. (2019). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1117/dorong-pengembangan-pariwisata-daerah-kemepar-ajak-pelaku-umkm-bidang-pariwisata-maksimalkan-pemanfaatan-kur>, diakses tanggal 3 Januari 2024
- www.djpb.kemenkeu.go.id. (2022). <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat-perekonomian-nasional-meningkat.html>, diakses tanggal 5 Januari 2024.
- www.tribunnews.com¹. (2023). <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/07/04/ekonomi-biru-jadi-prioritas-kerja-sama-negara-asean>, diakses tanggal 17 Januari 2024
- www.tribunnews.com². (2023). <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/07/01/lewat-ais-forum-indonesia-maksimalkan-kerja-sama-ekonomi-biru>, diakses tanggal 19 Januari 2024
- www.suara.com. (2023). <https://www.suara.com/bisnis/2023/12/18/124019/kemenkomarves-sebut-potensi-ekonomi-biru-menjanjikan>, diakses tanggal 8 Januari 2024.
- www.sdgs.un.org. (2024). <https://sdgs.un.org/topics/sustainable-tourism#:~:text=The%20World%20Tourism%20Organization%20defines,the%20environment%20and%20host%20communities%22>, diakses tanggal 15 Januari 2024.
- www.kemenkopukm.go.id, (2024). <https://www.kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>
(www.aisforum.org, 2024).
-